



‘Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019

Muhammad Alif Alauddin*, Khalis Asyifani, Herlina, Mustika Ayu Permata Putri

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sosiologi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, 57126

Submitted: 06 Mei 2020 Revision: 14 Juni 2020 Accepted: 23 Januari 2021

Abstrak

‘Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki peran aktif dalam pergerakan kelompok perempuan di Indonesia. Sebagai organisasi perempuan yang berusia hampir 100 tahun, ‘Aisyiyah telah berkontribusi memajukan perempuan Indonesia dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, bahkan juga dalam bidang politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran ‘Aisyiyah dalam penekanan angka golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah mengulik peran Muslimah ‘Aisyiyah dalam melakukan sosialisasi politik-keagamaan pada Pemilihan Umum 2019 serta arah dukungan berdasarkan basis pendukung di tingkat akar rumput. Penelitian ini dilakukan di Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Surakarta dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah periode 2015 - 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam serta studi pustaka terkait pergerakan wanita. Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa poin yaitu; (1) ‘Aisyiyah memiliki peran penting dalam penekanan angka golput pada pemilihan umum tahun 2019, (2) ‘Aisyiyah mendukung Partai Amanat Nasional (PAN) dan secara aktif terlibat dalam kampanye, (3) seluruh anggota kepengurusan Muhammadiyah beserta keluarganya merupakan bagian dari basis massa ‘Aisyiyah. Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan sosiologis dalam melihat penguatan keagamaan dalam praktik politik yang menjadi tren pada Pemilihan Umum 2019 di Indonesia.

Kata Kunci: ‘Aisyiyah, Pergerakan Muslimah, Politik Identitas, Surakarta

Abstrak

‘Aisyiyah is one of the autonomous organizations of Muhammadiyah which actively participate in the movement of women groups in Indonesia. As a women's organization which will reach its 100th years, ‘Aisyiyah contributes to empower Indonesian women in various sectors such as education, health, economics, social welfare, as well as politics. This study aims to describe the role of ‘Aisyiyah in suppressing the abstainers in the Indonesian General Election of 2019. This research is conducted at the ‘Aisyiyah District head of Surakarta by using qualitative descriptive method. Informants are chosen purposively in accordance with ‘Aisyiyah Surakarta's organizational structure period of 2015-2020. The study finds several points; (1) ‘Aisyiyah has an important role in suppressing the number of abstentions in the 2019 general elections, (2) ‘Aisyiyah supports National Mandate Party (PAN) and actively involved in political campaign, (3) all members Muhammadiyah and their families are part of the ‘Aisyiyah mass-base. This research contributes as a sociological approach in reviewing the arose of religious-based political movement which popularly used in the Indonesia 2019 election.

Password: ‘Aisyiyah, Politic of Identity, Woman Participation, Surakarta

How to Cite: Alauddin M. H, dkk. (2019). Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 13 (1): 15-28

*Corresponding author: Muhammad Alif Alauddin

E-mail: malifaaa@student.uns.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan menjadi suatu ajang pesta demokrasi nasional. Pada tahun 2019, pemilu tidak hanya ditujukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden saja, namun juga pemilihan anggota legislatif. Terhitung ada 711 kursi yang diperebutkan oleh calon anggota legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang meliputi 575 kursi untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 136 untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berbagai jenis kampanye dari para calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakilnya sudah mulai dilakukan terhitung sejak bulan September 2018 (Fitri, 2018).

Sebanyak 192,83 juta jiwa menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 17 April 2019. Angka tersebut terdiri atas DPT dalam negeri sejumlah

190,77 juta jiwa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar negeri sejumlah 2,06 juta jiwa (CNN Indonesia, 2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait, menghimbau kepada masyarakat yang telah mendapatkan hak pilih untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Himbauan tersebut diberikan sebagai respon dari maraknya isu kelompok Golongan Putih (golput) yang akan selalu muncul menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan data Pilpres dari tahun ke tahun, tingkat golput pada tahun 1999 mencapai 31,02 juta suara atau 20,24 persen. Kemudian pada tahun 2004 mencapai 33,98 juta suara atau 22,56 persen. Peningkatan angka golput juga terjadi di tahun 2009 dengan jumlah 43,38 juta suara atau 27,43 persen dan kembali meningkat menjadi 58,99 juta suara atau 31 persen di tahun 2014 (Purnamasari, 2018).

Dalam pergerakan politik di Indonesia, kelompok golongan putih (golput) mulai populer di era tujuh puluhan, yang dipelopori oleh Arif Budiman. Golongan ini muncul akibat

ketidakpuasan beberapa oknum masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu tahun 1971 (Rohmawati, 2016).

Menurut kalangan aktivis kampus pada saat itu, pemilu tahun 1971 merupakan sebuah ajang penipuan sistematis terhadap rakyat. Protes pertama mereka dilakukan dengan mengumandangkan ide “tidak ikut pemilu”. Ide tersebut kemudian dikenal dengan sebutan golongan putih (golput) (Yanuarti, 2016).

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka golongan putih di Indonesia. Pemahaman politik bagi masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya memang penting, namun tidaklah cukup untuk menekan semakin tingginya angka golput yang ada (Immanuel, 2015).

Organisasi- organisasi sosial dalam masyarakat memiliki peran penting dalam strategi penekanan angka golongan putih (Nyarwi, 2009). Salah organisasi yang dinilai progresif menyuarakan pentingnya politik adalah satunya Organisasi “Aisyiyah.

‘Aisyiyah merupakan salah satu Organisasi Otonom dalam

Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki peran aktif dalam pergerakan kelompok perempuan di Indonesia .Sebagai organisasi perempuan di Indonesia yang telah memasuki 100 tahun perjuangan, ‘Aisyiyah telah banyak berkarya dan berkontribusi dalam memajukan pergerakan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga Pendidikan politik (Fauzia, 2004).

Berbagai macam pola perilaku muncul saat agenda pemilihan umum berlangsung, banyak orang-orang yang mantap memilih wakil rakyat, hingga yang cenderung acuh bahkan golput. Kondisi tersebut mendorong respon lain dari masyarakat yaitu upaya pemberian pendidikan politik oleh kelompok-kelompok berpengaruh kepada masyarakat awam. Kondisi tersebut sejalan dengan teori tindakan sosial dari Max Weber yang menyatakan bahwa manusia memiliki perilaku yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Beetham, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat potret peran Muslimah yang tergabung dalam Organisasi 'Aisyiyah Kota Surakarta dalam melakukan sosialisasi politik-keagamaan pada Pemilihan Umum 2019 serta arah dukungan berdasarkan basis pendukung di tingkat akar rumput.

Apabila ditinjau lebih jauh, Kota Surakarta identik dengan kebangkitan politik Islam, seperti terbentuknya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada fase merebut kemerdekaan yang sampai saat ini terus diwariskan. Terdapat banyak aliran islam yang eksis menyebarkan paham ideologi dan tak jarang mempengaruhi atmosfer politik. Terlebih pada Pemilihan Umum 2019, sentimen agama menjadi isu populis dalam mendongkrak suara calon atau partai politik tertentu. Sehingga urgensi penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas isu politik-keagamaan yang potensi dibawa oleh Organisasi 'Aisyiyah Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi literatur terdahulu, observasi dan wawancara mendalam terhadap informan sebagaimana berikut

Tabel 1. Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Lama Bergabung
Hj. Siti Maesaroh, SAg	Ketua	32 Tahun
Dewi Isa' Maratati, S,Psi.	Anggota Lembaga Kebudayaan	25 Tahun
Hj. Hindun Zulaikha	Kepala Majelis Dikdas	17 Tahun
Siti Fatmawati, M.Kep.	Ketua Majelis Pembinaan Kader	12 Tahun
Hj. Suratmi Sumedi.	Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial	14 Tahun

Sumber Data Primer, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Otonom 'Aisyiyah sebagai *Non-Government Organization*

'Aisyiyah merupakan organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah yang didirikan pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917 bertepatan dengan momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selaras dengan jargon organisasi induk Muhammadiyah, 'Aisyiyah juga memegang teguh prinsip dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid yang berasaskan Islam serta bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam satu abad kiprahnya di Indonesia, saat ini 'Aisyiyah telah memiliki 34 Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting 'Aisyiyah (setingkat Kelurahan).

Selain itu, 'Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai bidang antara lain pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan

masyarakat. Beberapa bentuk amal usaha 'Aisyiyah antara lain meliputi Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu, dan masih banyak lagi terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim Indonesia meliputi *Qoryah Thayyibah*, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3.785 (PDA Kota Surakarta, 2016).

Difusi sebagai Sarana Penekan Golput

Amal usaha 'Aisyiyah yang disebutkan diawal belum mencantumkan peranan anggotanya dalam bidang pendidikan politik. Keberlangsungannya sebagai organisasi sosial tak membatasi 'Aisyiyah untuk turut berpartisipasi dalam pendidikan politik anggotanya. Salah satu wujud partisipasi 'Aisyiyah dalam menerapkan politik yang sehat adalah turut menekan

angka golput di Indonesia. Meskipun begitu, 'Aisyiyah tetap tidak memberikan klaim bahwa 'Aisyiyah merupakan organisasi politik. Hal ini seperti yang disampaikan Hj. Hindun Zulaikha sebagai kepala Majelis Dikdas dalam struktur kepengurusan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah, yang ditemui pada tanggal 5 April di kantor Pimpinan Daerah (Pimda) 'Aisyiyah Surakarta:

"Disini terus terang 'Aisyiyah itu organisasi sosial bukan organisasi politik" (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Tak sampai di situ, Hj. Siti Maesaroh, S.Ag selaku Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Surakarta menjelaskan mengenai keikutsertaan 'Aisyiyah dalam dunia politik yang sempat macet. Hal tersebut dikarenakan masih sensitifnya bahasan politik dalam internal organisasi berbasis Islam seperti 'Aisyiyah, maupun Muhammadiyah. Menurut Hj. Siti Maesaroh, SAg, masih banyak anggota yang merasa bahwa bahasan politik merupakan hal yang tabu apabila dibawa dalam forum organisasi sosial. Di sisi, lain ungkapan

Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai peran perempuan dalam memelopori gerakan anti golput, menyatakan bahwa KPU rupanya telah membuat kelompok kolektif dari berbagai gerakan wanita di Surakarta termasuk 'Aisyiyah untuk melakukan sosialisasi seputar pemilu dan himbauan minimal kepada anggotanya untuk tidak golput. Hj. Siti Maesaroh, SAg memberikan tanggapan sebagai berikut:

"Karena KPU itu telah mengundang beberapa organisasi wanita di Solo, antara lain 'Aisyiyah, Muslimat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kemudian GOW, GOW itu Gerakan Organisasi Wanita, Fataya juga. Ya itu diundang intinya untuk melakukan sosialisasi ttg pemilu, termasuk himbauan untuk tidak golput itu." (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Berangkat dari itu dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki progres usaha yang cukup baik dengan merealisasikan pendidikan politik yang

memberdayakan perempuan di Kota Surakarta. Rupanya beberapa organisasi wanita tersebut turut berpartisipasi langsung untuk mewujudkan pemilu yang sehat di Surakarta. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan pada pemilu presiden di bulan April 2019 saja, namun telah dilakukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018.

Upaya pengolektifan partisipasi organisasi perempuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini memiliki beberapa tujuan khusus yang ditekankan agar dapat terealisasi yaitu 1). Agar masyarakat tidak golput, 2). Agar jadi pemilih yang cerdas, 3). Agar tidak tertarik dengan *money politic*. Ketiga hal tersebut muncul sebagai bentuk evaluasi dari pemilu-pemilu sebelumnya yang menunjukkan tingkat golput dan *money politic* yang tinggi. Pada proses sosialisasi ini, para wakil dari tiap organisasi wanita diharapkan mampu bersikap netral tanpa memihak calon wakil rakyat yang diusung. Hj. Siti Maesaroh, S.Ag menuturkan bahwa setiap perwakilan organisasi memiliki

tupoksi kerjanya masing-masing dalam melakukan sosialisasi:

“Misalkan saya di ‘Aisyiyah ya sosialisasi dilingkup ‘Aisyiyah, yang PKK dilingkup masyarakat umum Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), di lingkup Fataya Nahdlatul Ulama (NU) ya berarti dilingkungan NU, kemudian yang dilingkungan Gerakan Organisasi Wanita ke lingkaran perkumpulannya, kemudian ada yang dari gereja Santa Maria dan sebagainya yang intinya mensosialisasikan”. (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perwakilan organisasi wanita memiliki peran dalam lingkup organisasinya masing-masing. Di internal ‘Aisyiyah sendiri, beberapa anggota atau pengurus yang tergabung dalam relawan KPU ini menyampaikan sosialisasi pemilu serta himbauan untuk tidak golput dalam forum-forum atau majelis. Hal tersebut dapat disampaikan baik secara langsung dalam forum sosialisasi dan penyuluhan atau

pemilu tanpa golput, Hj. Hindun Zulaikha menyampaikan:

“Kali ini baru bangkit lagi, karena sudah tahu kalo kita islam ini betul-betul perlu memahami politik sebenarnya, karena politik itu kan masuk ke Siyasa. Itulah kenapa seharusnya organisasi islam juga perlu menghadapi pemilu, ada ilmunya. Sekarang berbangkitlah, saya sudah kerasa baru kali ini alim ulama dan sebagainya terjun menentukan pilihannya.”.

(Wawancara tanggal 5 April 2019)

Disampaikan juga oleh Dewi Isa' Maratati, S, Psi. bahwa keikutsertaan organisasi islam dalam jalur politik belakangan memang tidak banyak. Mayoritas masyarakat muslim masih menganggap bahasan politik merupakan sebuah bahasan yang sensitif dan memicu perpecahan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip berkumpul dalam majelis. Bukan berarti masyarakat dalam organisasi Islam tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, hanya saja porsi partisipasinya tidak lebih dari sekedar mencoblos atau

mencontreng. Namun beberapa tahun terakhir 'Aisyiyah bersama Muhammadiyah sepakat bahwa organisasi Islam juga perlu berpartisipasi dalam perwujudan pemilu yang lebih



Gambar 2. Pengajian Daerah pada Hari Jumat.
Sumber Gambar Pribadi

baik.

Arah Dukungan Politik 'Aisyiyah

Hj. Siti Maesaroh, SAg selaku pimpinan daerah 'Aisyiyah Surakarta yang bertanggung jawab atas fungsi politis dan keagamaan menyampaikan bahwa:

“Saat ini 'Aisyiyah sudah mau berpartisipasi dalam politik meskipun tidak banyak. Sekarang kalau ada calon legislatif (caleg) dari Muhammadiyah, atau dari 'Aisyiyah

sendiri, ya didukung”. (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa sebelumnya, ‘Aisyiyah sendiri murni bergerak di bidang sosial. Dengan begitu anggotanya sama sekali acuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Seperti telah disampaikan bahwa politik masih dianggap tabu terutama apabila masuk kedalam majelis. Namun beberapa tahun terakhir rupanya kesadaran anggota Muhammadiyah termasuk ‘Aisyiyah mulai berani terbuka dengan bahasan politik terutama dalam pemilu, sebagaimana yang dikemukakan Dra, Hj. Sri Lestari:

“‘Aisyiyah sekarang beda dengan yang dulu. Organisasinya kan peduli dengan politik melihat situasi yang seperti sekarang ini ‘Aisyiyah tergugah untuk berjihad berdakwah untuk islamnya terutama.”
(Wawancara tanggal 5 April 2019)

Hj. Hindun Zulaikha menyampaikan bahwa saat ini Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah mulai merekomendasikan anggotanya untuk

mengajukan diri sebagai anggota legislatif. Berdasarkan paparannya, di Kota Surakarta terdapat 5 nama calon anggota legislatif Muhammadiyah, salah satunya perempuan dari ‘Aisyiyah. Dewi Isa’ Maratati, S, Psi. menyatakan bahwa Muhammadiyah, termasuk di dalamnya ‘Aisyiyah memilih Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kecenderungan politik organisasi. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) sendiri merupakan sesepuh dari Muhammadiyah.

“Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dari kader muhamadiyah itu pak Amin Rais. Siapa lagi yang akan ngopeni partai kita kalau bukan pak Amin Rais. Makanya itu dari kita ya terus ngumpulkan caleg- caleg yang dari Partai Amanat Nasional (PAN)”.
(Wawancara tanggal 5 April 2019)

Disampaikan juga bahwa ‘Aisyiyah mencoba untuk mengikuti arah gerak organisasi induknya yaitu Muhammadiyah. Saat ini ‘Aisyiyah

sudah memulai untuk melakukan pendidikan politik kepada anggotanya terkait dengan kecenderungan daya dukung untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga diharapkan dapat menyusul angka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah satu yang dapat dilakukan oleh 'Aisyiyah adalah perbanyak sosialisasi mengenai Partai Amanat Nasional (PAN) kepada anggotanya agar dapat serentak membirukan pemilu dari sisi organisasi islam modern saat ini.

Basis Dukungan

Dalam menjalankan roda organisasinya, para perempuan 'Aisyiyah selalu mengacu pada kurikulum atau prosedur yang dibuat oleh Muhammadiyah. Mayoritas basis utama organisasi Aisyayah adalah perempuan yang merupakan istri dari suami seorang anggota Muhammadiyah atau berpartisipasi secara individu di kepengurusan. Mereka yang tergabung didalamnya, seperti yang dilansir dalam buku Sejarah dan Langkah 'Aisyiyah Kota Surakarta dari awal berdirinya sampai saat ini, struktur anggota memiliki riwayat pendidikan yang

tinggi dimulai dari tingkat sarjana, magister, dan doktoral. Selain melalui jalur pendidikan formal, mereka memiliki rekam jejak pendidikan agama yang diwariskan oleh keluarganya yang juga anggota Muhammadiyah. Dalam memantau seluruh basis dukungannya, 'Aisyiyah daerah Surakarta memiliki hierarki kepengurusan yang diungkapkan oleh Hj. Hindun Zulaikha sebagai berikut:

"'Aisyiyah itu mempunyai 7 cabang, ini adalah tingkat kota 7 cabang itu kalo istilah pemerintah itu 7 kecamatan. cabang itulah kecamatan, ranting itu kelurahan".

(Wawancara tanggal 5 April 2019)

Setiap agenda yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah 'Aisyiyah Kota Surakarta memiliki tujuan untuk merekatkan setiap anggotanya. Beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti *Munadhoroh* atau pembahasan ayat Al Qur'an dan Hadis setiap sebulan sekali, pengajian daerah yang diselenggarakan setiap setengah bulan sekali pada Jum'at pertama dan ketiga dan bertempat di Musholla kantor pimpinan daerah

Surakarta, pengajian peringatan Hari Besar Islam dan *milad* atau hari jadi 'Aisyiyah, dan kegiatan majelis lainnya. Dari banyaknya agenda tersebut, pengurus inti 'Aisyiyah selalu menyisipkan himbauan dan informasi-informasi tambahan diluar materi majelis, termasuk pendidikan politik anggota.

Kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh 'Aisyiyah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dinilai sangat efektif dalam mensolidkan suara pada internal organisasi. Fokus utamanya adalah penguatan prinsip untuk lingkup internal 'Aisyiyah itu sendiri. Hj. Hindun Zulaikha menyatakan:

"Ya diutamakan dilingkup aisyiah, dimulai dengan pengajian, pengajian yang lain ndak papa, di lingkup sesame (Rukun Tetangga) RT atau Rukun Warga (RW) ndak papa. Yang disosialisasikan itu PAN nya itu, syukur" bisa mejadikan biru. Solo kan mayoritas merah, mudah- mudahan bisa jadi biru" (Wawancara tanggal 5 April 2019)

Langkah 'Aisyiyah dalam mensosialisasikan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kecenderungan politik organisasi dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi aktif organisasi dalam ranah politik.

SIMPULAN

Pemilihan umum tahun 2019 menjadi sebuah kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk secara bijaksana menggunakan hak pilihnya demi mengurangi tingginya angka golongan putih (golput). 'Aisyiyah sebagai organisasi bagi wanita Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan kini telah melebarkan sayap amal usahanya dalam pendidikan politik sebagai bentuk partisipasi organisasi dalam mewujudkan politik yang sehat.

Salah satu peranan yang diambil 'Aisyiyah daerah Surakarta adalah dengan tergabung dalam relawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada program penekanan angka golput di Surakarta. Langkah yang dilakukan 'Aisyiyah yaitu dengan memberikan

sosialisasi terkait pendidikan politik anggota 'Aisyiyah yang disampaikan dalam forum penyuluhan, atau disisipkan sebagai himbauan dalam materi majelis *taklim* yang rutin diselenggarakan. Praktik semacam ini sangat berdampak positif sebagai proses difusi penyebaran pesan politik pada tataran masyarakat agamis.

Selain turut menekan tingginya angka golput di Indonesia, saat ini 'Aisyiyah bersama Muhammadiyah secara terbuka menghimbau seluruh keluarga besar Muhammadiyah sebagai basis massa organisasi untuk memberikan dukungan politik pada kader-kader yang menjadi anggota legislatif dengan kecenderungan politik kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Secara akar sejarah dan gerakan, informan merupakan kesatuan konstituen PAN yang tergabung dalam Muhammadiyah sebagai organisasi inti dan 'Aisyiyah sebagai organisasi sayap untuk kaum wanita. Dengan demikian, 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muslimah di Kota Surakarta berperan positif terhadap keberlangsungan pesta

demokrasi 2019 tanpa memainkan sentimen agama.

DAFTAR PUSTAKA

Beetham, D. (2018). *Max Weber and the theory of modern politics*. John Wiley & Sons.

CNN Indonesia. (2019). *KPU: Jumlah Pemilih Tetap Pemilu 2019 Capai 192 Juta*. Retrieved June 16 2020, from CNN Website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181215171713-32-353929/kpu-jumlah-pemilih-tetap-pemilu-2019-capai-192-juta>

Fauzia, A. (2004). *Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan*. Gramedia Pustaka Utama.

Fitri, A. (2018). *Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 113-131.

Imanuel, Fiorentinus Christian. 2015. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak*

Kabupaten Kutai Kartanegara. E-Journal Ilmu Pemerintah. Volume 3. Nomor 2.

2020, from PDA Kota Surakarta website: <http://kota-surakarta.'Aisyiyah.or.id/id/page/peran-dan-perkembangan.html>

Nyarwi, N. (2009). *Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(3), 281-305.

Purnamasari, Desi. (2018). *Gelombang Golput yang Tak Pernah Surut*. Retrieved June 16 2020, from Tirto.id website: <https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc>

Rohmawati, T. (2016). *PERILAKU PEMILIH GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) JAWA BARAT TAHUN 2008*. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 5(2).

Yanuarti, S. (2016). *Golput dan Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 21-32.

PDA Kota Surakarta. (2016). *PERAN DAN PERKEMBANGAN "AISYIYAH*. Retrieved June 17